



**RANCANGAN AKHIR (RANHIR)
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**



**PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat 2, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang Perencanaan Daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supayadisempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi

hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,);

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah

- Sebagai penjabaran Rencana Kerja pemerintah daerah Kab. Balangan Tahun 2025;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana kerja Tahun 2025 sebagai

berikut: Bab I :Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun Lalu
dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-Isu Penting

Penyelenggaraan Tugas Dan
Fungsi Perangkat Daerah

- 2.4 Review Terhadap Rancangan

Awal RKPD

Bab III: Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Daerah Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan telah meriview terhadap hasil Renja tahun 2023. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1 (T.C.29)

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUNGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 - 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) (BARU)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) (LAMA)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)				Target dan Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun(n-2) 2023						Perkiraan Realisasi Capaian Target		
			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Lalu 2021 (kosong hasilnya karena beda indikator)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Realisasi		Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2023)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023 trimester 1	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPKPAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPKPAD	80 (BB) Nilai	152.110.003.710			72 (BB) Nilai	28.865.630.842	69,95 (BB) Nilai	20.222.029.541	69,95 (BB) Nilai	70%	72 (BB) Nilai	69,95 (BB)	87,44 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	1.548.213.617			100%	266.957.800	100%	228.186.000	100%	85%	100%	50,00%	20%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	302.113.257			1 Dokumen	52.021.800	2 Dokumen	39.986.800	2 Dokumen	77%	1 Dokumen	3 Dokumen	40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	30 Laporan	861.585.844			6 Laporan	134.483.400	6 Laporan	130.546.600	6 Laporan	97%	6 Laporan	9 Laporan	40%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 Laporan	384.514.516			1 Laporan	80.452.600	1 Laporan	57.652.600	1 Laporan	72%	1 Laporan	2 Laporan	40%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Lancarnya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	78.329.374.278			100%	14.436.428.742	100%	10.216.750.499	100%	71%	100%	50%	20%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3480 Orang/Bulan	75.188.981.931			696 Orang/Bulan	13.908.897.342	696 Orang/Bulan	9.820.107.574	696 Orang/Bulan	71%	696 Orang/Bulan	1044 Orang/Bulan	40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	650.428.397			6 Dokumen	146.795.000	6 Dokumen	130.161.500	6 Dokumen	89%	6 Dokumen	9 Dokumen	40%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahu SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahu SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	355.751.745			6 Laporan	70.736.700	6 Laporan	49.559.800	6 Laporan	70%	6 Laporan	6 Laporan	40%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	30 Laporan	2.134.212.205			6 Laporan	309.999.700	6 Laporan	216.821.625	6 Laporan	70%	6 Laporan	9 Laporan	40%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	15.171.375.788			100%	1.667.447.400	100%	1.101.258.404	100%	66%	100%	50%	20%

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	807.490.368			1 Paket	233.648.000	1 Paket	191.170.000	1 Paket	82%	1 Paket	1 Paket	20%
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	372.832.420			200 orang	350.799.400	200 orang	34.616.800	200 orang	10%	200 orang	260 Orang	40%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	13.991.053.000			320 orang	1.083.000.000	320 orang	875.471.604	320 orang	81%	320 orang	480 Orang	20%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan aministrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Kegiatan aministrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10.299.675.437			100%	4.515.732.700	100%	2.097.036.983	100%	46%	100%	50%	20%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	546.235.518			1 Paket	142.989.200	1 Paket	63.936.100	1 Paket	45%	1 Paket	1 Paket	20%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.628.264.052			1 Paket	2.363.718.500	1 Paket	1.681.630.000	1 Paket	71%	1 Paket	1 Paket	20%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	82.648.502			1 Paket	33.213.000	1 Paket	31.766.800	1 Paket	96%	1 Paket	1 Paket	20,0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	360 Dokumen	153.191.350			360 Dokumen	31.500.000	90 Dokumen	2.400.000	90 Dokumen	8%	360 Dokumen	1 Paket	125%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1730 Laporan	1.889.336.015			346 Laporan	1.944.312.000	346 Laporan	317.304.083	346 Laporan	16%	346 Laporan	360 Laporan	40%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	27.799.590.000			100%	4.990.000.000	100%	4.872.324.200	100%	98%	100%	50%	20%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Unit	27.799.590.000			25 Unit	4.990.000.000	30 Unit	4.872.324.200	30 Unit	98%	25 Unit	37 Unit	39%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6.238.728.849			100%	1.320.063.600	100%	808.643.031	100%	61%	100%	50%	20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.122.688.488			12 Laporan	701.968.000	12 Laporan	451.422.231	12 Laporan	64%	12 Laporan	18 Laporan	40%
Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	797.301.361			12 Laporan	172.921.000	12 Laporan	39.015.000	12 Laporan	23%	12 Laporan	18 Laporan	40%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	2.318.539.000			12 Laporan	445.174.600	12 Laporan	318.205.800	12 Laporan	71%	12 Laporan	18 Laporan	40%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.723.045.741			100%	1.669.000.600	100%	897.830.424	100%	54%	100%	50%	20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	3.960.546.887			20 Unit	999.791.400	20 Unit	416.962.624	20 Unit	42%	20 Unit	30 Unit	40%

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	4.609.089.740			10 Unit	57.500.000	0%	0	0%	0%	10 Unit	0 Unit	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4.153.409.114			20 Unit	611.709.200	20 Unit	480.867.800	20 Unit	79%	20 Unit	30 Unit	200%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	90%	1.698.368.101.032			100%	322.987.754.375	78738%	202.901.992.321	78738%	62,82%		79%	87,49%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	14.933.547.670			100%	2.987.984.900	100%	2.307.977.200	100%	77,24%		50%	20%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	772.198.820			2 Dokumen	145.743.000	2 Dokumen	79.341.116	2 Dokumen	54,44%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	769.547.570			2 Dokumen	113.810.000	2 Dokumen	76.589.170	2 Dokumen	67,30%	2 Dokumen	2 Dokumen	40%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	4.996.377.253			30 Dokumen	973.853.000	30 Dokumen	784.993.908	30 Dokumen	80,61%	30 Dokumen	30 Dokumen	40%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	195.927.260			30 Dokumen	82.321.000	30 Dokumen	64.974.488	30 Dokumen	78,93%	30 Dokumen	60 Dokumen	40%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.806.755.800			2 Dokumen	421.780.000	2 Dokumen	264.852.145	2 Dokumen	62,79%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.795.637.670			2 Dokumen	245.926.000	2 Dokumen	204.058.219	2 Dokumen	62,79%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	4.597.103.297			2 Dokumen	1.004.551.900	2 Dokumen	833.068.154	2 Dokumen	82,93%	2 Dokumen	2 Dokumen	40%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningnya Sistem Perbendaharaan Daerah	Meningnya Sistem Perbendaharaan Daerah	100%	15.342.804.176			100%	3.989.670.800	100%	3.464.195.171	100%	86,83%	100%	50%	20%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	2.442.651.990			12 Dokumen	377.590.000	12 Dokumen	254.464.696	12 Dokumen	67,39%	12 Dokumen	18 Dokumen	200%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	661.724.117			12 Dokumen	197.571.400	12 Dokumen	178.653.308	12 Dokumen	90,42%	12 Dokumen	12 Dokumen	40%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	500 Dokumen	1.914.561.012			100 Dokumen	1.262.972.000	100 Dokumen	1.097.045.434	100 Dokumen	86,86%	100 Dokumen	50 Dokumen	20%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15 Laporan	1.629.608.253			3 Laporan	429.991.000	3 Laporan	337.286.498	3 Laporan	3 Laporan	78,44%	5 Laporan	40%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	2.004.884.637			12 Dokumen	466.668.500	12 Dokumen	457.802.596	12 Dokumen	12 Dokumen	98,10%	18 Dokumen	40%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	2.203.494.023			2 Dokumen	340.101.700	2 Dokumen	299.130.313	2 Dokumen	2 Dokumen	87,95%	3 Dokumen	40%
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	4.485.880.144			100 Orang	914.776.200	100 Orang	839.812.326	100 Orang	100 Orang	91,81%	50 Orang	20%

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Lancarnya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Lancarnya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	100%	12.883.720.222			100%	3.532.745.300	100%	2.906.295.203	100%	82,27%	100%	50%	20%
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3840 Dokumen	1.811.742.441			1000 Dokumen	482.367.600	768 Dokumen	385.095.198	768 Dokumen	79,83%	1000 Dokumen	384 Dokumen	20%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	90 Laporan	626.075.076			18 Laporan	157.291.000	18 Laporan	98.151.000	18 Laporan	62,40%	18 Laporan	26 Laporan	20%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3040 Laporan	624.389.967			608 Laporan	127.463.100	608 Laporan	87.406.393	608 Laporan	68,57%	608 Laporan	910 Laporan	40%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.764.570.956			1 Dokumen	316.528.300	1 Dokumen	266.868.700	1 Dokumen	84,31%	1 Dokumen	1 Dokumen	40%
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	3.045.217.617			1 Dokumen	444.414.100	1 Dokumen	364.774.964	1 Dokumen	82,08%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	5.011.724.165			100 Orang	2.004.681.200	100 Orang	1.703.998.948	100 Orang	85,00%	100 Orang	150 Orang	40%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Kelancaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Kelancaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1.655.208.028.964			100%	312.477.353.375	100%	194.223.524.747	100%	62,16%	100%	50%	20%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30 Laporan	1.510.917.078.384			6 Laporan	305.046.166.000	6 Laporan	191.363.763.800	6 Laporan	62,73%	6 Laporan	7 Laporan	40%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan	134.716.754.261			6 Laporan	5.603.265.908	6 Laporan	1.034.500.000	6 Laporan	18,46%	6 Laporan	8 Laporan	40%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	30 Laporan	9.574.196.319			6 Laporan	1.827.921.467	6 Laporan	1.825.260.947	6 Laporan	99,85%	6 Laporan	8 Laporan	40%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	3 Angka	17.124.197.273				3.656.389.400	2,7 Angka	3.291.292.316	2,7 Angka	90,01%		2,7 angka	90%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	3 Angka	17.124.197.273			100%	3.656.389.400	2,7 Angka	3.291.292.316	2,7 Angka	90,01%	100%	2,7 angka	90%
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	1.228.642.996			2 Dokumen	238.774.800	2 Dokumen	236.640.900	2 Dokumen	99,11%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	300 Dokumen	3.579.330.467			60 Dokumen	755.971.400	60 Dokumen	736.913.640	60 Dokumen	97,48%	60 Dokumen	90 Dokumen	40%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	931.392.304			2 Dokumen	128.336.200	2 Dokumen	124.227.590	2 Dokumen	96,80%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi LHI Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi LHI Barang Milik Daerah	150 Laporan	624.788.424			30 Laporan	379.899.100	30 Laporan	356.484.498	30 Laporan	93,84%	30 Laporan	44 Laporan	40%

Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 Laporan	2.910.921.320			30 Laporan	601.170.500	30 Laporan	580.419.365	30 Laporan	96,55%	30 Laporan	44 Laporan	40%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	150 Laporan	281.073.651			30 Laporan	49.641.500	30 Laporan	39.986.710	30 Laporan	80,55%	30 Laporan	44 Laporan	40%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	25.665.941.556			30 Dokumen	462.858.200	30 Dokumen	313.789.092	30 Dokumen	67,79%	30 Dokumen	44 Dokumen	40%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	150 Laporan	4.449.111.956			30 Laporan	943.926.000	30 Laporan	830.639.821	30 Laporan	88,00%	30 Laporan	44 Laporan	40%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	450 Orang	552.994.599			90 Orang	95.811.700	90 Orang	72.190.700	90 Orang	75,35%	90 Orang	134 Orang	40%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase PBB P-2 BPHTB Presentase Penerimaan PAD Selain PBB- P2 dan BPHTB, dan Presentase Pendapatan non PAD	Presentase PBB P-2 BPHTB Presentase Penerimaan PAD Selain PBB- P2 dan BPHTB, dan Presentase Pendapatan non PAD	100%	16.065.765.629				4.011.163.200	100%	3.118.013.762	100%	77,73%		50%	20%
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Lancarnya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Lancarnya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	16.065.765.629			100%	4.011.163.200	100%	3.118.013.762	100%	77,73%	100%	50%	20%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	1.715.629.713			2 Dokumen	383.337.800	2 Dokumen	339.356.313	2 Dokumen	88,53%	2 Dokumen	3 Dokumen	40%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15 Laporan	3.964.090.516			3 Laporan	1.043.001.800	2 Laporan	663.249.800	2 Laporan	63,59%	3 Laporan	5 Laporan	33%

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	2.273.728.450			1 Laporan	619.194.200	1 Laporan	543.263.190	1 Laporan	87,74%	1 Laporan	2 Laporan	40%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	210000 Objek Pajak	1.234.661.195			4200 Objek Pajak	328.996.400	4200 Objek Pajak	267.018.334	4200 Objek Pajak	81,16%	4200 Objek Pajak	52596 Objek Pajak	40%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 Laporan	2.126.661.195			3500 L	949.593.000	3500 Laporan	702.459.014	3500 Laporan	73,97%	3500 Layanan	3543 Laporan	200%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60 Dokumen	528.222.957			12 Dokumen	91.693.600	12 Dokumen	85.686.500	12 Dokumen	93,45%	12 Dokumen	18 Dokumen	40%
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60 Dokumen SSPD	1.362.164.403			12 Dokumen SSPD	261.714.200	12 Dokumen SSPD	236.820.700	12 Dokumen SSPD	90,49%	12 Dokumen SSPD	18 Dokumen SSPD	40%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	977.121.334			12 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	142.852.800	12 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	119.115.850	12 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	83,38%	12 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	15 Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan	21,67%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60 Dokumen LHP	1.883.525.689			12 Dokumen LHP	190.779.400	12 Dokumen LHP	161.044.061	12 Dokumen LHP	84,41%	12 Dokumen LHP	18 Dokumen LHP	40%

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Berkualitas
2. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD	Baik	Baik	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pendapatan daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata – Rata Capaian				100%	Sangat Tinggi

SASARAN I

Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

**CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

SASARAN PERTAMA	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran pertama ***Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*** adalah:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Capaian indikator Opini BPK di dukung oleh capaian kinerja Jabatan Fungsional yaitu Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- a. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Rekonsiliasi Keuangan	Kualitas Laporan 1 Persentase Permasalahan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan Daerah	Laporan Perangkat Daerah 2 Persentase Perangkat yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yaitu :

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- b. Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)
- c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) :

3. Faktor yang mendukung baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah pelaksanaan rekonsiliasi yang rutin di setiap SKPD. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini

disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Agar data akuntansi yang dihasilkan dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi. Dengan adanya rekonsiliasi baik itu di internal SKPD maupun rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban untuk komponen belanja dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk komponen Aset serta Bidang Penagihan dan Pelaporan untuk komponen pendapatan, maka dapat dihasilkan data yang akurat sehingga turut meningkatkan kualitas laporan keuangan

4. Telah dilakukan pengelolaan aset dengan baik. Informasi aset tetap telah disajikan sesuai standar yang ditetapkan, didukung oleh penatausahaan yang memadai serta telah dilakukan pengamanan terhadap aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan secara fisik, sehingga nilai laporan aset yang disajikan dalam LKPD dapat menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sesungguhnya
5. Telah dilakukan pengelolaan keuangan yang taat asas berdasarkan asas tertib taat pada peraturan administrasi perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga potensi timbulnya kerugian keuangan negara serta penyimpangan keuangan dapat dieliminasi.
6. Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, telah dilaksanakan dengan baik.
7. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK.

Faktor hambatan utama penyebab belum baiknya kualitas laporan keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan adalah

- a. Faktor pertama belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya.
- b. Faktor kedua adalah masih kurangnya keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai.
- c. Faktor ketiga adalah kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan,

hal ini tergambar Sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal.

Dalam mempertahankan capaian dan solusi dalam mengatasi hambatan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan terus-menerus melakukan upaya sebagai berikut:

1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan, dan sebagainya), juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodik dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Balangan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola aset dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.
3. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi FMIS, SIPD-RI, Modul Aset, Sipanda BMD Kab. Balangan, Sicaper (Sistem Pencatatan Persediaan), Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online, dan HotLiser (Hotline Service) Administrasi yang berkaitan dengan Pelayanan Publik
4. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah)
5. Menyusun kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
6. Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

SASARAN II**Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD**

	2022	2023			Capaian 2023
INDIKATOR	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Terhadp 2026
Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Capaian pengukuran atau penilaian terhadap pengelolaan BMD Kabupaten Balangan tahun 2022 berada di nilai 2,2 dari target yang berada di angka 2,55 yang secara konversi predikat telah berada pada posisi **Baik**.

Tahun 2023 terjadi peningkatan nilai sebesar 0,4 poin sehingga capaian menjadi 2,6 dengan target nilai 2,6. Namun secara konversi predikat masih berada pada posisi **Baik**

CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SASARAN KEDUA	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran kedua ***Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD*** adalah:

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian indikator Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah didukung oleh capaian kinerja Jabatan Fungsional yaitu Analis Kebijakan dengan Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah
5. Pengamanan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Pengamanan BMD	1 Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan, Administratif dan Fisik BMD	100 Register	100 Register	100%
2	Terlaksananya Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	2 Jumlah Aset BMD yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar BMD	800 Objek	800 Objek	100%
3	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan	3 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan BMD pada SKPD	30 SKPD	30 SKPD	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Dilaksanakannya secara berkala koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka pengamanan administratif, fisik dan hukum barang milik daerah
4. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

1. Masih banyaknya BMD khususnya bidang tanah yang belum memiliki alas hak sesuai ketentuan
2. Masih terdapat BMD yang tercatat sebagai aset namun secara fisiknya tidak ditemukan maupun sebaliknya ada BMD yang secara fisik ada namun tidak terdaftar pada Daftar Barang Milik Daerah, umumnya aset perolehan tahun lama.

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Melaksanakan dengan sepenuhnya apa yang termuat pada Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan, membentuk Tim Percepatan Sertifikasi tanah milik daerah, meningkatkan koordinasi dengan semua Pengguna Barang/SKPD untuk memastikan lokasi aset bidang tanah maupun dokumen pendukungnya agar seluruh bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemda terdaftar pada BPN dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai (SHP).
2. Mendorong Pengguna Barang/SKPD melakukan penatausahaan BMD khususnya pada area pembukuan/pencatatan atas perolehan aset agar melengkapi semua isian informasi BMD dan memberikan penanda yang jelas pada BMD sesuai SOP yang ada.
3. Melakukan pencatatan atas BMD yang belum tercatat dan melakukan penelusuran kembali terhadap aset yang belum ditemukan.

REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 **JF ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Inventarisasi BMD	1 Tersusunnya a Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	8 Laporan	8 Laporan	100%
2	Terlaksananya Penyusunan LBMD	2 Tersusunnya Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah	3 Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Pengelolaan BMD Aset dan	120 Berita Acara	120 Berita Acara	100%

	Kabupaten Balangan		Persediaan			
			SKPD			
Rata-Rata Capaian						100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Dilaksanakannya rekonsiliasi penatausahaan BMD antara Bidang Pengelolaan BMD dengan Pengurus Barang Pengguna setiap triwulan, Bidang Pengelolaan BMD dengan Bidang Akuntansi setiap semester di tahun berjalan
4. Memberikan pelatihan/bimbingan teknis serta pendampingan dalam kegiatan penatausahaan BMD yang meliputi pembukuan, inventarisasi serta pelaporan BMD berbasis aplikasi
5. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

1. Pada SKPD masih terdapat terbatasnya akses Pengurus Barang maupun Pembantu Pengurus Barang dalam memperoleh salinan dokumen pertanggungjawaban dalam rangka kegiatan penatausahaan dan pelaporan BMD
2. Masih terdapat Pengurus Barang Pengguna yang juga merangkap tugas lainnya

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Melakukan koordinasi dengan fungsi perbendaharaan dilanjutkan membuat Surat Edaran dari Pengelola Barang tentang SOP pada tahap proses pembayaran pengadaan barang/jasa agar PPTK menyampaikan salinan/copy pertanggungjawaban kepada Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang
2. Memberikan masukan kepada Pengguna Barang/Kepala SKPD agar Pengurus Barang Pengguna tidak merangkap tugas lain serta memberikan motivasi dan atau dukungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEBIJAKAN**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya Penyusunan Standard Harga, Penyusunan RKBMD	1 Tersusunnya SSH, ASB dan RKBMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan	2 Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan BMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
3	Terlaksananya Kegiatan Pemamfaatan Barang Milik Daerah	3 Tersedianya Naskah Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

1. Adanya komitmen, kepedulian dan tanggung jawab dari semua stakeholder terkait dalam rangka merealisasikan apa yang telah ditargetkan pada awal tahun 2023
2. Fokus pada tujuan atau target yang akan dicapai
3. Membuat kerjasama dengan pihak ketiga (LPPM ULM Banjarmasin) dalam penyusunan SSH dan ASB

4. Pengembangan aplikasi Sipanda BMD dalam rangka mendukung penyusunan RKBMD berbasis aplikasi dan dilengkapi dengan pemberian pelatihan/bimbingan teknis serta pendampingan input data RKBMD masing-masing SKPD
5. Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai

Permasalahan/hambatan

1. Keterlambatan penyampaian usulan harga satuan dari SKPD dari batas waktu yang telah ditentukan serta pengajuan usulan tambahan pada saat telah masuk waktu penyusunan rencana kerja dan anggaran
2. Belum selarasnya waktu proses penyusunan RKBMD/RKPBMD dengan proses perencanaan dan penganggaran
3. Belum tersedia standar kebutuhan barang masing-masing SKPD secara detail dan komprehensif

Solusi/strategi pemecahan masalah

1. Meningkatkan pemahaman melalui sosialisasi atau sejenisnya kepada Pengguna Barang/SKPD serta berkoordinasi intens dengan TAPD Kabupaten terutama dengan fungsi perencanaan dan keuangan pada masing-masing SKPD
2. Membuat standar kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD

SASARAN III

Meningkatnya Pendapatan Daerah

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 Terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pendapatan	101%	100%	113,98%	113,98%	113,98%

Berdasarkan tabel diatas untuk indikator Persentase Peningkatan Pendapatan capaiannya sebesar 113,98%. Dari target yang ingin dicapai di tahun 2023 sebesar 100% terealisasi sebesar 113,98%.

**CAPAIAN KINERJA IKU ESSELON III
KEPALA BIDANG LAYANAN, PENDATAAN & PENETAPAN
dan KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN
PELAPORAN**

SASARAN KETIGA	Meningkatnya Pendapatan Daerah				
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Peningkatan Pendapatan	101%	100,00%	113,98%	113,98%	113,98%

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ketiga

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Capaian indikator Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah didukung oleh capaian kinerja

Jabatan Fungsional yaitu Analis Keuangan Pusat dan Daerah dengan Sub Kegiatan :

1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

**REALISASI CAPAIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023
JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengendalian Pajak Daerah	1 Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
		2 Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Tersusunnya Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah	3 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Rata-Rata Capaian					100%

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari para pengampu/ dari masing-masing penanggung jawab akan segala sesuatu yang menjadi ranah tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik
- b. Dari awal perencanaan/penentuan target sudah dilaksanakan dengan matang dan menentukan Langkah dan apa saja yang harus dilaksanakan guna tercapainya target yang telah ditetapkan
- c. Dilaksanakannya monitoring/reviu secara berkala memantau pencapaian realisasi dari target.

Permasalahan / Hambatan

- a. Waktu untuk pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan SKPD terkait, dan pengiriman peserta sesuai kriteria tujuan dari pelaksanaan kegiatan

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah

- a. Komitmen dari SKPD terkait untuk bisa support dan komit terhadap goal/ tujuan yang ingin dicapai, sehingga Ketika pelaksanaan kegiatan, peserta yang dikirimkan untuk berhadir adalah yang memiliki kapasitas untuk itu.

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Keberhasilan pencapaian indikator tidak terlepas juga dari Ketersediaan anggaran. Tersedianya anggaran yang mencukupi, sangat mendukung dalam melaksanakan kegiatan dan realisasi kinerja. Adapun Realisasi APBD tahun 2023 sebesar Rp. 35.111.063.193,- atau 74,98% dari pagu sebesar Rp. 46.828.056.242,0

Tabel Penggunaan Sumber daya Keuangan TA. 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72 (BB) Nilai	69,95 (BB) Nilai	97,15%	28.865.630.842	20.222.029.541	70,06	8.643.601.301
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	266.957.800	228.186.000	85,48	38.771.800
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	52.021.800	39.986.800	76,87	12.035.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	134.483.400	130.546.600	97,07	3.936.800
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	80.452.600	57.652.600	71,66	22.800.000

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	14.436.428.742	10.216.750.499	70,77	4.219.678.243
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/Bulan	696 Orang/Bulan	100%	13.908.897.342	9.820.107.574	70	4.088.789.768
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	146.795.000	130.161.500	88,67	16.633.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	70.736.700	49.559.800	70,06	21.176.900
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	309.999.700	216.921.625	69,97	93.078.075
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	1.667.447.400	1.101.258.404	66,04	566.188.996
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	233.648.000	191.170.000	81,82	42.478.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	200 orang	100%	350.799.400	34.616.800	9,87	316.182.600

3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 orang	320 orang	100%	1.083.000.000	875.471.604	80,84	207.528.396
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%	4.515.732.700	2.097.036.983	46,44	2.418.695.717
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	142.989.200	63.936.100	44,71	79.053.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	2.363.718.500	1.681.630.000	71,14	682.088.500
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	33.213.000	31.766.800	95,65	1.446.200
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	360 Dokumen	90 Dokumen	25%	31.500.000	2.400.000	7,62	29.100.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346 Laporan	346 Laporan	100%	1.944.312.000	317.304.083	16,32	1.627.007.917
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100%	4.990.000.000	4.872.324.200	97,64	117.675.800

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38 Unit	38 Unit	78,95%	4.990.000.000	4.872.324.200	97,64	117.675.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	1.320.063.600	808.643.031	61,26	511.420.569
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	701.968.000	451.422.231	64,31	250.545.769
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	172.921.000	39.015.000	22,56	133.906.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	445.174.600	318.205.800	71,48	126.968.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	1.669.000.600	897.830.424	53,79	771.170.176
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	20 Unit	100%	999.791.400	416.962.624	41,70	582.828.776
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 Unit	0 Unit	0%	57.500.000	-	-	57.500.000

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	20 Unit	100%	611.709.200	480.867.800	78,61	130.841.400
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	87 %	78,738 %	90,50%	322.987.754.375	202.901.992.321	62,82	120.085.762.054
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	100 %	100%	2.987.984.900	2.307.977.200	77,24	680.007.700
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	145.743.000	79.341.116	54,44	66.401.884
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	113.810.000	76.589.170	67,30	37.220.830
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	973.853.000	784.993.908	80,61	188.859.092
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	82.321.000	64.974.488	78,93	17.346.512
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	421.780.000	264.952.145	62,82	156.827.855

6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	245.926.000	204.058.219	82,98	41.867.781
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1.004.551.900	833.068.154	82,93	171.483.746
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	%	100	%	100%	3.989.670.800	3.464.195.171	86,83	525.475.629
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	696	Orang/Bulan	696	Orang/Bulan	100%	13.908.897.342	254.464.696	67,39	13.654.432.646
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	197.571.400	178.653.308	90,42	18.918.092
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	Dokumen	100	Dokumen	100%	1.262.972.000	1.097.045.434	86,86	165.926.566
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3	Laporan	3	Laporan	100%	429.991.000	337.286.498	78,44	92.704.502

5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	466.668.500	457.802.596	98,10	8.865.904
6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	340.101.700	299.130.313	87,95	40.971.387
7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Orang	100	Orang	100%	914.776.200	839.812.326	91,81	74.963.874
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100%	3.532.745.300	2.906.295.203	82,27	626.450.097
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	768	Dokumen	768	Dokumen	100%	482.367.600	385.095.198	79,83	97.272.402
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	Laporan	18	Laporan	100%	157.291.000	98.151.000	62,40	59.140.000
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	608	Laporan	608	Laporan	100%	127.463.100	87.406.393	68,57	40.056.707

4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	316.528.300	266.868.700	84,31	49.659.600
5	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	444.414.100	364.774.964	82,08	79.639.136
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	orang	100	orang	100%	2.004.681.200	1.703.998.948	85	300.682.252
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	%	100%	312.477.353.375	194.223.524.747	62,16	118.253.828.628
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6	Laporan	6	Laporan	100%	305.046.166.000	191.363.763.800	62,73	113.682.402.200
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6	Laporan	6	Laporan	100%	5.603.265.908	1.034.500.000	18,46	4.568.765.908
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	6	Laporan	6	Laporan	100%	1.827.921.467	1.825.260.947	99,85	2.660.520

3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,6	angka	2,6	angka	100%	3.656.389.400	3.291.292.316	90,01	365.097.084
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,6	angka	2,6	angka	100%	3.656.389.400	3.291.292.316	90,01	365.097.084
1	Penyusunan Standar Harga	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	238.774.800	236.640.900	99,11	2.133.900
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	60	Dokumen	60	Dokumen	100%	755.971.400	736.913.640	97,48	19.057.760
3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	128.336.200	124.227.590	96,80	4.108.610
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	379.899.100	356.484.498	93,84	23.414.602
5	Pengamanan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	601.170.500	580.419.365	96,55	20.751.135
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	49.641.500	39.986.710	80,55	9.654.790

7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30	Dokumen	30	Dokumen	100%	462.858.200	313.789.092	67,79	149.069.108
8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30	Laporan	30	Laporan	100%	943.926.000	830.639.821	88	113.286.179
9	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90	Orang	90	Orang	100%	95.811.700	72.190.700	75,35	23.621.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100	%	100	%	100%	4.011.163.200	3.118.013.762	77,73	893.149.438
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100	%	100	%	100%	4.011.163.200	3.118.013.762	77,73	893.149.438
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	383.337.800	339.356.313	88,53	43.981.487

2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%	1.043.001.800	663.249.800	63,59	379.752.000
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	619.194.200	543.263.190	87,74	75.931.010
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42000 Objek Pajak	42000 Objek Pajak	100%	328.996.400	267.018.334	81,16	61.978.066
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3500 Laporan	3500 Laporan	100%	949.593.000	702.459.014	73,97	247.133.986
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	91.693.600	85.686.500	93,45	6.007.100
7	Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen SSPD	12 Dokumen SSPD	100%	261.714.200	236.820.700	90,49	24.893.500
8	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	8,33	142.852.800	119.115.850	83,38	23.736.950
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen LHP	12 Dokumen LHP	100%	190.779.400	161.044.061	84,41	29.735.339

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan isi Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disampaikan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang disajikan melalui tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	3	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87	87	87	88	89	90	90
	Indeks Pengelolaan Aset	38,91	40	42	45	48	52	52

|| Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ||

	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	6	6	7	7	8	8
	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	8	8	8	9	9	10	10
2	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Dalam upaya terhadap pencapaian visi dan misi SKPD serta capaian terhadap target dari program prioritas RPJMD ada beberapa hambatan serta permasalahan yang kami hadapi pada tahun 2024 sehingga berpengaruh pada pencapaian target kinerja SOPD kami dan pada perkembangan regulasi dan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan yang menyangkut dengan pengelolaan aset negara menyebabkan daerah harus menindaklanjutinya dengan melakukan terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Kerja Pemerintahan di daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti perkembangan tersebut, terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Adapun tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. *Weaknes* (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Balangan.
- 2) Adanya diklat, seminar, bimtek, workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. *Treath* (Ancaman)

- 1). Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2). Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 3). Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 4). Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
- 5). Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan diantaranya:

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Pengembangan pengelolaan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah;
6. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
7. Peningkatan profesionalisme aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesuai tuntutan kebutuhan;

Berdasarkan isu-isu penting tersebut di atas, maka perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan terutama dalam hal SDM aparatur, sarana dan prasarana pendukung.

- **Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, pelatihan untuk meningkatkan

proses dan hasil kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

- **Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan teknologi informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang lebih baik dalam menunjang pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang

disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.

Rancangan awal RKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 disusun dengan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah sampai tahun 2025 terkait dengan program prioritas/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dimana didalamnya terdapat 4 Program, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran Rp. 487.357.059.360, - Sebagaimana dapat dilihat pada tabel Berikut ini

::

Tabel 2.4 (T.C 31)
Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten
Balangan
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

KODE	Program/Kegiatan/Sub/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD				Indikator Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan/Sub/ Kegiatan	Lokasi		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH					487.357.059.360				487.357.059.360	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BPKPAD			34.743.582.399	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BPKPD		34.743.582.399	
5,02	KEUANGAN	BPKPAD			487.357.059.360	KEUANGAN	BPKPD		487.357.059.360	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPAD	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</i>	74,40 Nilai	34.743.582.399	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPKPD	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</i>	74,40 Nilai	34.743.582.399

5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu</i>	100 persen	840.382.300		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPD	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu</i>	100 persen	840.382.300
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	423.740.000			BPKAD	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	423.740.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	116.924.500			BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	116.924.500
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	299.717.800			BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1 Laporan	299.717.800

5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 persen	26.782.352.337	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	100 persen	26.782.352.337
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/bulan	26.782.352.337		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	60 Orang/bulan	26.782.352.337
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPAD			
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6 Dokumen	1.473.875.500		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	6 Dokumen	1.473.875.500
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 Laporan	107.659.900		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 Laporan	107.659.900
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	6 Laporan	212.906.500		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	6 Laporan	212.906.500
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 persen	2.432.514.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 persen	2.432.514.000
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	71.218.000		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	1 Paket	71.218.000
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	300 Orang	284.246.000		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	300 Orang	284.246.000
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	350 Orang	2.077.050.000		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	350 Orang	2.077.050.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	100 persen	1.453.164.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKPAD	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi umum</i>	100 persen	1.453.164.700
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	101.438.000		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	101.438.000
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	186.663.500		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	186.663.500
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	21.461.000		BPKPAD	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 Paket	21.461.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	160 Laporan	1.143.602.200		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	160 Laporan	1.143.602.200
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	<i>Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	1.503.583.024	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	<i>Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	1.503.583.024

|| Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ||

5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	601.857.000		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	601.857.000
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	17.070.000		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	17.070.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	884.656.024		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	884.656.024
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	<i>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	1.731.586.038	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKPAD	<i>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	12 bulan	1.731.586.038
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

		BPKPAD	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	63 Unit	596.746.800,00		BPKPAD	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	63 Unit	596.746.800,00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		BPKPAD	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	40 Unit	1.134.839.238		BPKPAD	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	40 Unit	1.134.839.238
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	444.582.462.661	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	444.582.462.661
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPAD	<i>Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu</i>	100 persen	2.733.548.920	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKPAD	<i>Persentase Rancangan APBD disampaikan tepat waktu</i>	100 persen	2.733.548.920
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	321.496.000,00		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	321.496.000,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									

		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	281.059.100,00		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>	2 Dokumen	281.059.100,00
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									
		BPKPAD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	30 Dokumen	56.435.600		BPKPAD	<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>	30 Dokumen	56.435.600
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD									
		BPKPAD	<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	30 Dokumen	51.653.000		BPKPAD	<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>	30 Dokumen	51.653.000
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
		BPKPAD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	400.885.000		BPKPAD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	2 Dokumen	400.885.000
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									

		BPKPAD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2 Dokumen	403.502.000		BPKPAD	<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	2 Dokumen	403.502.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	2 Dokumen	1.218.518.220		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>	2 Dokumen	1.218.518.220
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPAD	<i>% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan</i>	100 persen	5.223.134.100	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKPAD	<i>% SP2D sesuai ketentuan yang diterbitkan</i>	100 persen	5.223.134.100
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	12 Dokumen	370.169.700		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	12 Dokumen	370.169.700
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									

		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12 Dokumen	923.985.500		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	12 Dokumen	923.985.500
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank									

		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	1.164.737.000		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100	1.164.737.000
				Dokumen					Dokumen	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									

		BPKPAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	526.507.000		BPKPAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	526.507.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									

		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	12 Dokumen	617.368.400		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>	12 Dokumen	617.368.400
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									
		BPKPAD	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	2 Dokumen	589.641.000		BPKPAD	<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>	2 Dokumen	589.641.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									
		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	1.030.725.500		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	1.030.725.500

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPAD	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	100 persen	3.035.978.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKPAD	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	100 persen	3.035.978.500
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									
		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	768 Dokumen	105.013.000		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	768 Dokumen	105.013.000
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									
		BPKPAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	171.412.800		BPKPAD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	171.412.800
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									

		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	608 Laporan	286.331.500		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>	608 Laporan	286.331.500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
		BPKPAD	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	408.120.000		BPKPAD	<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	408.120.000
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									

		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	236.892.200		BPKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	236.892.200
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									
		BPKPAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	1.828.209.000		BPKPAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	1.828.209.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD		100 %	433.589.801.141		BPKPAD		100 %	433.589.801.141
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6 Laporan	390.172.098.600		BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	6 Laporan	390.172.098.600
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6 Laporan	40.000.000.000		BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6 Laporan	40.000.000.000
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	3.417.702.541		BPKPAD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	6 Laporan	3.417.702.541

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPAD	<i>Indeks Pengelolaan Aset</i>	45 indeks	4.402.191.900	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPAD	<i>Indeks Pengelolaan Aset</i>	45 indeks	4.402.191.900
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	<i>Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat</i>	15 persen	4.402.191.900	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	<i>Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat</i>	15 persen	4.402.191.900
			<i>Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan</i>	100 persen				<i>Persentase pemindah tanganan BMD yang selesai dilaksanakan</i>	100 persen	

|| Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ||

			<i>Persentase penyelesaian LBMD tahunan Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting</i>	100 persen				<i>Persentase penyelesaian LBMD tahunan Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting</i>	100 persen		
				100 persen					100 persen		
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga										
		BPKPAD	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2 Dokumen	238.819.200			BPKPAD	<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>	2 Dokumen	238.819.200
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	32 Dokumen	213.321.900			BPKPAD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	32 Dokumen	213.321.900
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	4 Dokumen	140.857.900			BPKPAD	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	4 Dokumen	140.857.900
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	108.474.000			BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	108.474.000

|| Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ||

5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	835.932.400			BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	835.932.400
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	51.131.400			BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	1 Laporan	51.131.400
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	5 Dokumen	980.130.000			BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	5 Dokumen	980.130.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										

		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	621.898.600		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>	1 Laporan	621.898.600
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									
		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	64 Orang	1.211.626.500		BPKPAD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	64 Orang	1.211.626.500
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD	<i>% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD</i>	100 persen	3.628.822.400	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD	<i>% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD</i>	100 persen	3.628.822.400
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	<i>Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	100 persen	3.628.822.400	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD	<i>Persentase terlaksananya kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	100 persen	3.628.822.400
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									

		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	3 Dokumen	306.418.000		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah</i>	3 Dokumen	306.418.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	5 Laporan	387.445.100		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	5 Laporan	387.445.100	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	1 Laporan	1.252.257.700		BPKPAD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>	1 Laporan	1.252.257.700	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)										
		BPKPAD	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	42000 Obyek Pajak	295.557.200		BPKPAD	<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>	42000 Obyek Pajak	295.557.200	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah										

		BPKPAD	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	3500 Layanan	509.328.300		BPKPAD	<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>	3500 Layanan	509.328.300	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	12 Dokumen	151.027.000		BPKPAD	<i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i>	12 Dokumen	151.027.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	298.589.000		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>	12 Dokumen	298.589.000	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										
		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	6 Dokumen	207.254.500		BPKPAD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>	6 Dokumen	207.254.500	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										

		BKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Daerah	4 Dokumen	220.945.600		BKPAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	220.945.600
					487.357.059.360					487.357.059.360

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Musrenbang Tingkat Kabupaten yang melibatkan unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), menghasilkan usulan kebutuhan kegiatan. Hasil itu selanjutnya dibahas lagi dalam Musrenbang dengan stakeholder untuk mengevaluasi apakah usulan tersebut memang merupakan kegiatan yang benar-benar diperlukan di masyarakat. Stakeholder yang terlibat antara lain LSM, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, organisasi profesi, kelompok/forum informasi masyarakat, dan sebagainya. Peranan Badan Keuangan Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Badan Keuangan Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yaitu: Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kearifan. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, di mana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan buatan orang perorang ataupun kelompok Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah "ruh" ideologi akan memiliki "raga", keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dahsyat. Sedangkan kata-kata "berdaulat, mandiri dan berkepribadian" adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya

kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.

Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
2. Kemandirian aparat pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
3. Kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri;
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan

ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata.

Penyelenggaran pemerintahan daerah yang dibiayai oleh APBD, yang disusun melalui perencanaan anggaran terdiri dari sumber pendanaan dan penggunaan dana/anggaran. Sumber pendanaan berasal dari PAD, dana bagi hasil/perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah termasuk penerimaan pembiayaan. Sedangkan penggunaan dana terkonsep dalam konsep penganggaran terpadu (*unifield budgeting*) yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada pencapaian efisiensi alokasi dana dan untuk menghindari terjadinya duplikasi belanja. Efisiensi alokasi dana dan pencegahan terhadap duplikasi belanja dapat dilakukan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan

2021 – 2026 yaitu :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada pencapaian misi ke-4 Kabupaten Balangan yaitu :

“Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara”.

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Balangan maka di dalam RPJMD Kabupaten Balangan tertuang Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Tujuannya adalah : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel.**

Sasarannya adalah :

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan menyeluruh dan

terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, ***sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan yaitu : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi.***

Adapun rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran beserta target disampaikan pada tabel 3.2

Tabel. 3.2

**Tujuan dan Sasaran Renja Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Renja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke-
				2025
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pengelolaan Keuangan dan Aset byang berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan BMD	Predikat Indek Pengelola Aset Daerah	Baik
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan	Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Per 100 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Program kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan akan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Balangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam tugas dan fungsinya sebagai SKPD yang menunjang keberhasilan pencapaian Misi ke-4 Kepala Daerah yang tertuang dalam Kebijakan umum dan Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Adapun untuk mencapai hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merumuskan 4 Program, 12 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran Rp. 564.382.384.315, - rincian pada table TC. 33

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten
Balangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

NO	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Induktif (Rp) Rancangan Akhir	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Induktif (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) BPKPAD	BPKPAD	72 Nilai (BB)	39,411,552,454	APBD			38,217,940,639
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sub Kegiatan	BPKPAD	100 %	840,382,100	APBD		100 %	924,420,530
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKPAD	2 Dokumen	423,740,000	APBD		2 Dokumen	466,114,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKPAD	3 Laporan	116,924,500	APBD		3 Laporan	128,616,950
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKPAD	1 Laporan	299,717,600	APBD		1 Laporan	329,689,580
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		BPKPAD	100 %	26,782,352,337.00	APBD		100 %	29,460,587,571

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKPAD	57 Orang/Bulan	24,987,910,437	APBD		60 Orang/bulan	27,486,701,481
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BPKPAD	6 Dokumen	1,473,875,500	APBD		6 Dokumen	1,621,263,050
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKPAD	6 Laporan	107,659,900	APBD		6 Laporan	118,425,890
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	BPKPAD	6 Laporan	212,906,500	APBD		6 Laporan	234,197,150
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		BPKPAD	100 %	3,037,164,000	APBD		100 %	2,675,765,400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BPKPAD	1 Paket	175,868,000.00	APBD		1 Paket	78,339,800
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPAD	300 orang	284,246,000.00	APBD		300 Orang	312,670,600
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKPAD	350 orang	2,577,050,000	APBD		350 Orang	2,284,755,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		BPKPAD	100 %	1,992,442,800	APBD		100 %	1,598,481,170

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPKPAD	1 Paket	101,438,000	APBD		1 Paket	111,581,800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKPAD	1 Paket	725,941,600	APBD		1 Paket	205,329,850
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BPKPAD	1 Paket	21,461,000	APBD		1 Paket	23,607,100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKPAD	160 Laporan	1,143,602,200	APBD		160 Laporan	1,257,962,420
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BPKPAD	100 %	3,220,239,200	APBD		100 %	1,653,941,326
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPKPAD	12 Laporan	2,302,657,000	APBD		12 Laporan	662,042,700
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPKPAD	12 Laporan	17,070,000	APBD			18,777,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKPAD	12 Laporan	900,512,200	APBD		12 Laporan	973,121,626
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		BPKPAD	100 %	3,538,972,017	APBD		100 %	1,904,744,642

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKPAD	20 Unit	596,746,800	APBD		63 Unit	656,421,480.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPKPAD	40 Unit	2,942,225,217	APBD		40 Unit	1,248,323,162
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		BPKPAD	87 %	495,169,870,661	APBD		100%	488,816,935,437
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		BPKPAD	100 %	2,733,548,920	APBD		100%	3,006,903,812
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	BPKPAD	2 Dokumen	321,496,000	APBD		1 Dokumen	353,645,600
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	BPKPAD	2 Dokumen	281,059,100	APBD		1 Dokumen	309,165,010
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang Diverifikasi	BPKPAD	30 Dokumen	56,435,600	APBD		30 Dokumen	62,079,160
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	BPKPAD	30 Dokumen	51,653,000	APBD		30 Dokumen	56,818,300
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD	2 Dokumen	400,885,000	APBD		2 Dokumen	440,973,500

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD	2 Dokumen	403,502,000	APBD			443,852,200
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD	2 Dokumen	1,218,518,220	APBD		2 Dokumen	1,340,370,042
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		BPKPAD	100 %	5,223,134,100	APBD		100 %	5,521,674,020
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	12 Dokumen	370,169,700	APBD		12 Dokumen	407,186,670
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKPAD	12 Dokumen	923,985,500	APBD		12 Dokumen	1,016,384,050
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	BPKPAD	100 Dokumen	1,164,737,000	APBD		12 Dokumen	1,281,210,700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKPAD	3 Laporan	526,507,000	APBD		3 Laporan	579,157,700

	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKPAD	12 Dokumen	617,368,400	APBD		12 Dokumen	617,368,400
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	BPKPAD	2 Dokumen	589,641,000	APBD		1 Dokumen	589,641,000
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	150 Orang	1,030,725,500	APBD		100 Orang	1,030,725,500
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		BPKPAD	100 %	3,035,978,500	APBD		100 %	3,339,576,350
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	BPKPAD	768 Dokumen	105,013,000	APBD		768 Dokumen	115,514,300
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKPAD	18 Laporan	171,412,800	APBD		18 Laporan	188,554,080
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	BPKPAD	608 Laporan	286,331,500	APBD		608 Laporan	314,964,650

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKPAD	1 Dokumen	408,120,000	APBD		3 Dokumen	448,932,000
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKPAD	1 Dokumen	236,892,200	APBD		1 Dokumen	260,581,420
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	150 orang	1,828,209,000	APBD		108 Unit/Sub Unit Oeorganisasi	2,011,029,900
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BPKPAD	100 %	484,177,209,141	APBD		100 %	476,948,781,255
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKPAD	6 Laporan	390,759,506,600	APBD		6 Laporan	429,189,308,460
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD	6 Laporan	90,000,000,000	APBD		6 Laporan	44,000,000,000
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKPAD	6 Laporan	3,417,702,541	APBD		6 Laporan	3,759,472,795
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BPKPAD	2.6 Angka	25,723,736,500	APBD		100%	4,842,411,090

	Pengelolaan Barang Milik Daerah		BPKPAD	2.6 Angka	25,723,736,500	APBD		100%	4,842,411,090
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	BPKPAD	2 Dokumen	238,819,200	APBD		2 Dokumen	262,701,120
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKPAD	60 Dokumen	198,577,800	APBD		32 Dokumen	234,654,090
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	2 Dokumen	140,857,900	APBD		4 Dokumen	154,943,690
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi LHI Barang Milik Daerah	BPKPAD	30 Laporan	108,474,000	APBD		1 Dokumen	119,321,400
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD	30 Laporan	1,016,154,000	APBD		1 Laporan	919,525,640
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD	30 Laporan	158,398,600	APBD		1 Laporan	56,244,540
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKPAD	30 Dokumen	21,449,779,700	APBD		5 Dokumen	1,078,143,000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	BPKPAD	30 Laporan	709,996,300	APBD		1 Laporan	684,088,460
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD	90 Orang	1,702,679,000	APBD		64 Orang	1,332,789,150

4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BPKPAD	100 %	4,077,224,700	APBD		100 %	3,991,704,640
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		BPKPAD	100 %	4,077,224,700	APBD		100 %	3,991,704,640
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD	2 Dokumen	306,418,000	APBD		3 Dokumen	337,059,800
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD	3 Laporan	835,847,400	APBD		5 Laporan	426,189,610
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	BPKPAD	1 Laporan	1,252,257,700	APBD		1 Laporan	1,377,483,470
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BPKPAD	42000 Objek Pajak	295,557,200	APBD		42000 Objek Pajak	325,112,920
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BPKPAD	3500 Laporan	509,328,300	APBD		3500 Layanan	560,261,130
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BPKPAD	12 Dokumen	151,027,000	APBD		12 Dokumen	166,129,700
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD	12 Dokumen SSPD	298,589,000	APBD		12 Dokumen	328,447,900
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BPKPAD	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	207,254,500	APBD		6 Dokumen	227,979,950

Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BPKPAD	12 Dokumen LHP	220,945,600	APBD		4 Dokumen	243,040,160
Total				564,382,384,315				535,868,991,806

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Balangan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2025 akan melaksanakan 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 564.382.384.315,- (*Lima Ratus Enam Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).

Adapun kegiatan-kegiatan utama/prioritas yang dilaksanakan BPKPAD Kabupaten Balangan antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Perubahan APBD

7. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

1.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

1. Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2. Sub Kegiatan : Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
4. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
5. Sub Kegiatan : Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
6. Sub Kegiatan : Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

3. Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan L-O dan Beban.
 1. Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 2. Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

4. Sub Kegiatan : Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
5. Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga
 2. Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 3. Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 4. Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik
 5. Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
 6. Sub Kegiatan : Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 7. Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 8. Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 9. Sub Kegiatan : Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 2. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 3. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 4. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5. Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
6. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
8. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
9. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Adapun kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan BPKPAD Kabupaten Balangan antara lain :

D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 3. Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 2. Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB V

PENUTUP

Tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2025 ini selanjutnya diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan yang direncanakan akan terlaksana secara tertib, terarah, dan terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan-tujuan strategis.

Dengan dirumuskannya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan 2025 ini, semua kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan diharapkan akan mengacu pada Rancangan Akhir Renja yang telah disepakati bersama. Sehingga dapat mencapai tujuan organisasi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Balangan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Paringin, 2024
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Balangan,



FAKHRIYANTO, S.Pt, MP

